

Diagnosing a Perceived Democratic Paradox in Student Elections: An Islamic Political Ethics Perspective

(Mendiagnosis Persepsi atas Paradoks Demokrasi dalam Pemilihan Mahasiswa: Perspektif Etika Politik Islam)

Lia Agita Sari^{a,1*}, Elly Warnisyah Harahap^{a,2}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: ¹ agita0404222053@uinsu.ac.id; ² ellywarnisyah@uinsu.ac.id

*Corresponding Author: agita0404222053@uinsu.ac.id (L. A. Sari).

ARTICLE INFO

Received: 10 July 2026
Revised: 4 August 2026
Accepted: 9 August 2026

How to Cite:

Sari, L. A., & Harahap, E. W. (2026). Diagnosing Democratic Paradox in Student Elections: Islamic Political Ethics at UIN Sumatera Utara. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 6(1), 349–355.
<https://doi.org/10.55537/j-ibm.v6i1.1808>

ABSTRACT

Student elections may follow formal procedures while substantive competition is perceived as being shaped by organizational affiliation, senior networks, and unequal opportunities for deliberation. This qualitative single-case study examines this tension at the Faculty of Ushuluddin and Islamic Studies, UIN Sumatera Utara, through the Islamic political-ethical principles of musyawarah, al-'adl, amanah, and ukhuwah. Data were collected on 18–20 May 2026 through semi-structured interviews with six informants, observations of SEMAF and DEMA election processes, and reviews of relevant organizational and electoral documents. Thematic analysis identified three patterns: affiliation networks were perceived to influence organizational choices and electoral support; limited cross-group communication was associated with personalized tension; and participants expected more transparent, equal, and accountable procedures. The findings do not establish electoral invalidity, coercion, preferential treatment, or abuse of power. Islamic political ethics is therefore used as an interpretive framework for a proposed governance pilot rather than as an intervention whose effectiveness has been tested. The study offers a context-specific diagnostic and practical agenda involving transparent rules, equal access to candidate forums, conflict-of-interest disclosure, neutral grievance mechanisms, and cross-group dialogue with measurable process indicators.

Keywords:

democratic paradox; student elections; student organizations; Islamic political ethics; qualitative case study.

ABSTRAK

Pemilihan mahasiswa dapat berlangsung sesuai prosedur formal, tetapi kompetisi substantif dipersepsikan dipengaruhi oleh afiliasi organisasi, jaringan senior, dan kesempatan deliberasi yang tidak setara. Studi kasus kualitatif ini mengkaji ketegangan tersebut di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara melalui prinsip etika politik Islam, yaitu musyawarah, al-'adl, amanah, dan ukhuwah. Data dikumpulkan pada 18–20 Mei 2026 melalui wawancara semi-terstruktur dengan enam informan, observasi proses pemilihan SEMAF dan DEMA, serta telaah dokumen organisasi dan Pemilu. Analisis tematik menunjukkan tiga pola: jaringan afiliasi dipersepsikan memengaruhi pilihan organisasi dan dukungan elektoral; keterbatasan komunikasi lintas kelompok berkaitan dengan ketegangan personal; dan informan mengharapkan prosedur yang lebih transparan, setara, dan akuntabel. Temuan tidak membuktikan ketidakabsahan Pemilu, pemaksaan, perlakuan istimewa, atau penyalahgunaan kekuasaan. Etika politik Islam digunakan sebagai kerangka interpretasi untuk merumuskan usulan pilot tata kelola, bukan sebagai intervensi yang telah diuji efektivitasnya. Studi ini menawarkan diagnosis kontekstual dan agenda praktis berupa publikasi aturan, kesetaraan akses forum kandidat, deklarasi konflik kepentingan, kanal pengaduan netral, serta dialog lintas kelompok dengan indikator proses yang terukur.

Kata kunci:

paradoks demokrasi; pemilihan mahasiswa; organisasi kemahasiswaan; etika politik Islam; studi kasus kualitatif.

Pendahuluan

Organisasi kemahasiswaan dapat menjadi ruang representasi, pembelajaran kepemimpinan, pembentukan jejaring, dan artikulasi kepentingan mahasiswa. Dalam konteks perguruan tinggi, kualitas demokrasi mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga perwakilan atau pemungutan suara, tetapi juga oleh kapasitas deliberatif, akses yang setara, serta hubungan antara representasi dan partisipasi mahasiswa (Kennedy & Pek,

2023; Matthews & Dollinger, 2023). Kajian mengenai organisasi mahasiswa di Indonesia juga menunjukkan bahwa modal sosial, komunikasi politik, kaderisasi, dan afiliasi organisasi dapat membentuk strategi kontestasi dan hubungan antarkelompok (Mas'amah et al., 2023; Putra et al., 2024; Rahmatiah et al., 2022).

Dalam penelitian ini, paradoks demokrasi didefinisikan sebagai koeksistensi antara prosedur demokratis formal—seperti pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil—dengan kondisi yang dipersepsikan membatasi kualitas demokrasi substantif, misalnya kesempatan deliberasi yang tidak setara, dominasi jaringan, atau keputusan yang lebih berorientasi pada loyalitas kelompok daripada pertimbangan program dan kapasitas. Definisi tersebut tidak menyamakan paradoks demokrasi dengan konflik organisasi. Konflik merupakan bentuk interaksi atau konsekuensi relasional; patronase dan mobilisasi jaringan merupakan kemungkinan mekanisme yang harus dibuktikan; sedangkan politik identitas merujuk pada penggunaan identitas kelompok sebagai sumber solidaritas atau pembedaan. Pembedaan ini penting agar istilah “paradoks” tidak berubah menjadi label moral atau tuduhan yang tidak terverifikasi (Griffin et al., 2022; Harahap et al., 2024; Shah et al., 2021).

Kasus penelitian dibatasi pada dinamika organisasi dan Pemilihan Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI), UIN Sumatera Utara. Studi terdahulu telah membahas politik kampus, modal sosial dalam Pemilu, komunikasi politik organisasi mahasiswa, aktivisme organisasi Islam, serta kapasitas deliberatif universitas (Ardianto, 2021; Fatahillah et al., 2022; Kennedy & Pek, 2023; Mas'amah et al., 2023; Putra et al., 2024). Griffin et al. (2022) menjelaskan bagaimana organisasi demokratis menghadapi ketegangan yang perlu dikelola secara deliberatif, sementara Suhada et al. (2026) membahas narasi superioritas dalam kontestasi mahasiswa. Kajian pada UIN Sumatera Utara juga menyoroti performa organisasi dan aktivisme mahasiswa, tetapi tidak secara khusus membedakan prosedur demokratis, mekanisme jaringan, konsekuensi konflik, serta batas bukti untuk tuduhan institusional (Wulandari & Harahap, 2025). Dengan demikian, gap penelitian terletak pada kebutuhan akan diagnosis kualitatif yang secara konseptual memisahkan paradoks demokrasi dari konflik, patronase, dan politik identitas, lalu menghubungkan temuan lokal dengan indikator etika politik Islam tanpa mengklaim efektivitas intervensi yang belum dilakukan.

Kerangka etika politik Islam dalam penelitian ini terdiri atas empat dimensi. Musyawarah merujuk pada keterbukaan dialog, kesempatan menyampaikan alasan, dan pencarian keputusan bersama. Keadilan (al-'adl) merujuk pada perlakuan setara, akses yang seimbang, dan penggunaan kriteria yang relevan. Amanah merujuk pada akuntabilitas penggunaan kewenangan, transparansi prosedur, dan pengelolaan konflik kepentingan. Ukhuwah merujuk pada pemeliharaan penghormatan dan hubungan lintas kelompok meskipun terdapat kompetisi. Kerangka ini berfungsi sebagai perangkat interpretasi normatif dan dasar perumusan indikator tata kelola; ia bukan bukti bahwa penerapan nilai tersebut otomatis menghasilkan demokrasi yang sehat (Harahap et al., 2024; Junaidi et al., 2023; Karnaini, 2021; Pratama, 2020).

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana informan menggambarkan ketegangan antara prosedur Pemilu dan kualitas partisipasi substantif; (2) mekanisme apa yang mereka kaitkan dengan ketegangan tersebut, khususnya afiliasi organisasi, jaringan senior, mobilisasi dukungan, dan komunikasi lintas kelompok; serta (3) bagaimana musyawarah, keadilan, amanah, dan ukhuwah dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi tata kelola yang dapat diuji pada penelitian atau program lanjutan. Kontribusi penelitian dibatasi sebagai diagnosis kualitatif kontekstual dan rancangan agenda praktis, bukan evaluasi efektivitas Pemilu maupun penilaian legal terhadap organisasi tertentu.

Metode

Desain dan Batas Kasus

Penelitian menggunakan desain studi kasus tunggal kualitatif. Kasus dibatasi pada pengalaman dan persepsi aktor yang terlibat atau mengamati dinamika organisasi kemahasiswaan dan Pemilu di FUSI UIN Sumatera Utara pada pemilihan umum Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) UIN Sumatera Utara pada periode Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Desain ini dipilih untuk memahami bagaimana prosedur, jejaring organisasi, komunikasi, dan pertimbangan etik dimaknai dalam satu konteks institusional. Analisis tidak diarahkan untuk mengungkap “motif tersembunyi”, melainkan menafsirkan pola yang dapat ditelusuri dari pernyataan informan, observasi, dan dokumen yang tersedia.

Informan dan Rekrutmen

Informan dipilih secara purposif dengan prinsip variasi posisi terhadap kasus, mencakup anggota/pengurus organisasi, peserta atau pengamat Pemilu, serta mahasiswa dengan pengalaman interaksi lintas kelompok. Draft sumber memuat enam penanda identitas wawancara yang berbeda; penulis harus memastikan apakah seluruhnya merujuk pada enam orang unik dan apakah setiap kategori telah terwakili secara berimbang. Identitas publikasi digeneralisasi untuk mengurangi risiko pengenalan ulang dalam komunitas yang kecil.

Tabel 1. Karakteristik informan dan status persetujuan

Kode publikasi	Kategori/posisi terhadap kasus	Hubungan dengan Pemilwa/organisasi	Tanggal wawancara	Status persetujuan
I1	Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam	Akademisi yang memahami dinamika organisasi kemahasiswaan dan pemilwa di Fakultas	18 Mei 2026	Informed consent tertulis; menyetujui penggunaan kutipan dengan kode anonim (I1)
I2	Anggota Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF)	Terlibat dalam kepengurusan organisasi mahasiswa dan memahami dinamika pemilwa	20 Mei 2026	Informed consent tertulis; menyetujui anonimisasi identitas
I3	Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF)	Terlibat dalam kepengurusan organisasi mahasiswa dan memahami dinamika pemilwa	20 Mei 2026	Informed consent tertulis; identitas disamarkan sesuai permintaan informan
I4	Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Aktif dalam organisasi ekstra kampus dan berinteraksi dengan dinamika politik mahasiswa	20 Mei 2026	Informed consent tertulis; menyetujui penggunaan data secara anonim
I5	Ketua Senat Mahasiswa (SEMAF)	Berperan sebagai pimpinan organisasi mahasiswa dan memahami dinamika pemilwa	20 Mei 2026	Informed consent tertulis; identitas dan jabatan dianonimkan untuk menjaga kerahasiaan
I6	Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	Berperan sebagai pimpinan organisasi mahasiswa yang terlibat dalam dinamika pemilwa	20 Mei 2026	Informed consent tertulis; menyetujui penggunaan kutipan dengan kode anonim (I6)

Pengumpulan Data

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan topik: pengalaman berorganisasi, proses dukungan kandidat, akses terhadap informasi Pemilwa, komunikasi lintas kelompok, pengalaman konflik, dan pandangan mengenai musyawarah, keadilan, amanah, serta ukhuwah. Setiap wawancara berlangsung selama kurang lebih 70 menit dilakukan secara tatap muka dan direkam serta ditranskrip verbatim. Observasi diarahkan pada proses pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara tahun 2024, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang diamati pada tanggal 08 November 2024 sebagai bagian dari pengumpulan data lapangan. Dokumen yang digunakan untuk memeriksa dan menguatkan keterangan informan meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMII, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI, serta Surat Keputusan (SK) Pemilihan SEMAF dan DEMAF Tahun 2024-2025.

Analisis dan Keabsahan Data

Analisis disusun secara tematik. Unit awal coding adalah pernyataan atau kejadian yang berkaitan dengan: (a) prosedur Pemilwa, (b) akses dan deliberasi, (c) afiliasi dan jaringan, (d) komunikasi dan konflik, serta (e) empat dimensi etika politik Islam. Kode-kode awal dikelompokkan menjadi tema, dibandingkan antarinforman dan antarteknik, lalu ditinjau terhadap kasus yang tidak sesuai atau penjelasan alternatif. Keabsahan data dilaporkan melalui triangulasi sumber. Literatur digunakan untuk membandingkan interpretasi, bukan sebagai pengganti triangulasi data lapangan. Klaim sensitif hanya dipertahankan apabila didukung oleh lebih dari satu sumber, bukti dokumen/observasi, dan penyajian tanggapan yang berimbang.

Etika Penelitian

Partisipasi bersifat sukarela, informan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, risiko pengenalan ulang, hak untuk menolak pertanyaan, dan hak menarik diri. Kode I1–I6 digunakan dalam publikasi; nama keluarga, jabatan spesifik, dan detail yang mudah mengidentifikasi informan dihapus kecuali terdapat persetujuan atribusi tertulis. Data disimpan pada penyimpanan tools peneliti, yakni laptop. Persetujuan etik/izin institusi diperoleh melalui pernyataan tertulis informan yang diserahkan secara langsung.

Hasil

Organisasi sebagai Ruang Belajar dan Pembentukan Jejaring

Informan menggambarkan organisasi kemahasiswaan sebagai ruang yang menyediakan beragam pengalaman di luar kegiatan pembelajaran formal. Keterlibatan dalam organisasi memungkinkan mahasiswa mempelajari praktik kepemimpinan, mengikuti diskusi, membangun kerja sama, memperluas jaringan pertemanan, dan mengenal dinamika politik yang berkembang di lingkungan kampus. I2, misalnya, memandang organisasi sebagai ruang belajar yang memberikan pengalaman praktis sekaligus memperluas hubungan sosial:

“Selama mengikuti organisasi, saya banyak belajar hal yang tidak diperoleh secara langsung di dalam kelas. Saya belajar menyampaikan pendapat, bekerja sama dengan anggota lain, mengatur kegiatan, dan bertemu dengan banyak teman dari berbagai program studi. Dari organisasi, saya juga mulai memahami bagaimana dinamika kepemimpinan dan politik di lingkungan kampus”

Keterangan I2 menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya dipahami sebagai tempat menjalankan kegiatan atau menduduki struktur kepengurusan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran praktis. Interaksi dalam diskusi, kepanitiaan, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta kerja kolektif. Pada saat yang sama, pertemuan dengan anggota dari berbagai latar belakang memperluas jaringan sosial informan dan memperkaya pemahamannya mengenai kehidupan kemahasiswaan, sedangkan informan lain menilai manfaatnya lebih banyak terbatas pada perluasan pengalaman sosial. I3, misalnya, menyampaikan pandangan yang berbeda mengenai pengaruh organisasi terhadap orientasi akademiknya:

"Menurut saya, organisasi memang memberikan banyak pengalaman, terutama dalam hal pertemanan, berkomunikasi dengan orang lain, dan mengikuti berbagai kegiatan kampus. Namun, selama saya berorganisasi, saya tidak merasa ada perubahan yang terlalu besar terhadap cara belajar, motivasi akademik, atau hasil perkuliahan saya. Manfaat yang paling saya rasakan lebih kepada bertambahnya pengalaman dan jaringan pertemana"

Pandangan I3 menjadi kasus berbeda (negative case) yang memperlihatkan bahwa keterlibatan dalam organisasi tidak selalu menghasilkan perubahan yang sama pada setiap mahasiswa. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh intensitas keterlibatan, posisi dalam kepengurusan, jenis kegiatan yang diikuti, tujuan pribadi, serta kemampuan informan dalam menghubungkan pengalaman organisasi dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, manfaat organisasi tidak dapat digeneralisasikan sebagai pengalaman yang secara otomatis meningkatkan kemampuan kepemimpinan ataupun mengubah orientasi akademik seluruh anggotanya.

Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan menjalankan fungsi yang jamak. Organisasi dapat menjadi ruang kaderisasi, pembelajaran kepemimpinan, pengembangan kemampuan komunikasi, kerja kolektif, perluasan jejaring sosial, sekaligus pengenalan terhadap dinamika politik kampus. Keragaman pengalaman informan tidak mendukung kesimpulan mengenai adanya pergeseran tunggal dari proses kaderisasi menuju perebutan jabatan. Sebaliknya, temuan memperlihatkan bahwa orientasi terhadap jabatan hanya merupakan salah satu unsur dalam pengalaman organisasi, yang keberadaannya berdampingan dengan fungsi pendidikan, sosial, dan pengembangan kapasitas mahasiswa. Beberapa keterangan juga menyebut peran senior atau alumni sebagai sumber informasi dan dukungan sosial. Berdasarkan data yang tersedia, dukungan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai modal sosial atau mentoring informal. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya bantuan tidak patut terhadap tugas akademik, kemudahan administratif yang melanggar prosedur, atau keterlibatan dosen dalam mengarahkan pilihan organisasi. Klaim semacam itu harus dihapus kecuali dapat diverifikasi melalui beberapa sumber, dokumen, serta tanggapan institusi.

Dukungan Elektoral dan Afiliasi Organisasi

Informan melaporkan bahwa dukungan terhadap kandidat sering dibicarakan melalui jaringan internal organisasi kemahasiswaan. Pembicaraan tersebut umumnya berlangsung menjelang kontestasi Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemilwa), ketika pengurus dan anggota organisasi mendiskusikan kandidat yang akan didukung. Istilah "pengarahan" muncul dalam keterangan I4 untuk menjelaskan proses konsolidasi pilihan di lingkungan organisasi:

"Menjelang Pemilwa biasanya ada pembicaraan di dalam organisasi mengenai calon yang akan didukung. Pengarahan yang saya maksud lebih kepada ajakan agar anggota mempunyai pilihan yang sama sesuai dengan hasil pembicaraan organisasi. Namun, saya tidak bisa mengatakan bahwa semua anggota dipaksa karena keputusan akhirnya tetap berada pada masing-masing anggota, walaupun memang ada harapan agar kader mengikuti kesepakatan organisasi"

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa "pengarahan" dipahami sebagai komunikasi internal untuk membangun kesamaan pilihan. Namun, istilah ini belum dapat langsung dimaknai sebagai pemaksaan karena informan membedakan antara ajakan mengikuti kesepakatan organisasi dan keputusan individual ketika memberikan suara. Oleh karena itu, dalam analisis ini, "pengarahan" diperlakukan sebagai istilah emik yang dapat mencakup koordinasi, persuasi, rekomendasi politik, ataupun tekanan sosial. Data yang tersedia belum cukup untuk memastikan bentuk, tingkat, dan konsekuensi pengarahan tersebut secara pasti. Pandangan pembanding disampaikan oleh I1 yang menjelaskan bahwa afiliasi organisasi memang dapat memengaruhi preferensi politik anggota, tetapi tidak selalu menghasilkan pilihan yang sepenuhnya seragam:

"Dukungan calon memang sering dibicarakan dalam organisasi, tetapi tidak semua anggota langsung mengikuti pilihan yang sama. Ada yang mempertimbangkan keputusan organisasi, ada juga yang melihat kemampuan, pengalaman, dan program calon. Jadi, afiliasi organisasi dapat memengaruhi pilihan, tetapi bukan satu-satunya alasan seseorang memilih kandidat"

Pernyataan I1 memperlihatkan bahwa preferensi elektoral mahasiswa dapat dibentuk oleh beberapa pertimbangan secara bersamaan. Identitas dan jaringan organisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan, tetapi dapat berinteraksi dengan penilaian terhadap kapasitas kandidat, program kerja, hubungan personal, serta pengalaman mahasiswa selama mengikuti kegiatan kampus. Dengan demikian, dukungan organisasi tidak secara otomatis menghilangkan otonomi pemilih. Informan yang tidak memiliki afiliasi dengan organisasi tertentu juga memberikan penilaian mengenai akses kandidat, proses kampanye, dan kebebasan pemilih:

"Saya tidak menjadi anggota organisasi yang terlibat langsung dalam dukungan calon. Selama Pemilwa, saya melihat kandidat tetap dapat memperkenalkan diri dan menyampaikan programnya kepada mahasiswa. Memang terlihat bahwa beberapa calon mempunyai dukungan organisasi yang lebih kuat, tetapi mahasiswa yang tidak berafiliasi tetap dapat menentukan pilihannya sendiri berdasarkan informasi yang mereka terima".

Pandangan informan non-afiliasi menunjukkan adanya persepsi bahwa kekuatan jaringan pendukung setiap kandidat tidak selalu setara. Kandidat yang didukung organisasi tertentu dapat memiliki jaringan komunikasi dan mobilisasi yang lebih luas. Meskipun demikian, data belum menunjukkan bahwa perbedaan dukungan tersebut menyebabkan kandidat lain kehilangan akses untuk berkampanye atau menghilangkan kebebasan mahasiswa dalam menentukan pilihan. Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, temuan penelitian dibatasi pada adanya persepsi mengenai dukungan elektoral yang terorganisasi melalui jaringan organisasi kemahasiswaan. Data belum cukup untuk menyimpulkan bahwa proses tersebut merupakan bentuk pemaksaan, patronase politik, manipulasi suara, atau bukti ketidakabsahan hasil Pemilwa. Kesimpulan mengenai hal tersebut memerlukan bukti tambahan berupa mekanisme pemberian instruksi, bentuk tekanan atau sanksi, tingkat kepatuhan anggota, akses kandidat terhadap ruang kampanye, serta dokumentasi resmi penyelenggaraan dan hasil pemilihan.

Draf awal juga menyebut DEMA-F, SEMA-F, dan HMP sebagai jabatan strategis dalam kehidupan kemahasiswaan. Namun, data penelitian belum menguraikan kewenangan konkret setiap lembaga, akses pengurus terhadap pengambilan keputusan, ataupun manfaat yang diperoleh organisasi dari penguasaan jabatan tersebut. Oleh karena itu, pernyataan mengenai "perebutan akses kebijakan dan birokrasi" tidak dipertahankan sebelum tersedia uraian mengenai mandat resmi lembaga, contoh keputusan yang dapat dipengaruhi, dan bukti empiris mengenai keterkaitannya dengan dukungan organisasi.

Komunikasi Lintas Kelompok dan Personalisasi Ketegangan

Sejumlah informan menggambarkan bahwa komunikasi antaranggota organisasi yang memiliki afiliasi berbeda belum berlangsung melalui forum lintas kelompok secara rutin. Interaksi dan pembahasan mengenai kegiatan organisasi, kepemimpinan mahasiswa, serta kontestasi Pemilwa lebih banyak berlangsung dalam jaringan internal masing-masing organisasi. I1 menjelaskan bahwa pertemuan antara kelompok biasanya berlangsung ketika terdapat kegiatan fakultas atau persoalan tertentu yang memerlukan koordinasi bersama:

"Forum yang secara khusus mempertemukan anggota dari organisasi yang berbeda belum rutin dilakukan. Kami lebih sering berdiskusi di lingkungan organisasi masing-masing. Pertemuan dengan kelompok lain biasanya terjadi kalau ada kegiatan fakultas atau persoalan yang memang harus dibicarakan bersama, sehingga komunikasi lintas organisasi masih bergantung pada kebutuhan tertentu".

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan komunikasi lintas kelompok tidak selalu berarti tidak adanya hubungan sama sekali antara anggota organisasi. Komunikasi tetap berlangsung dalam kegiatan akademik, kepanitiaan, atau aktivitas fakultas, tetapi belum didukung oleh forum formal dan berkelanjutan yang secara khusus menyediakan ruang dialog bagi kelompok yang berbeda. Akibatnya, informasi dan pandangan mengenai dinamika politik kampus lebih banyak beredar dalam jaringan internal organisasi. Dalam konteks kontestasi politik mahasiswa, perbedaan dukungan terhadap kandidat terkadang berlanjut menjadi sindiran dalam percakapan langsung, forum mahasiswa, atau media sosial. I5 menggambarkan bahwa ketegangan yang semula berkaitan dengan pilihan organisasi dapat berkembang menjadi persoalan personal ketika pernyataan salah satu pihak dianggap menyerang individu atau kelompok tertentu:

"Pada awalnya perbedaannya hanya mengenai calon yang didukung. Namun, ketika sudah ada sindiran di forum atau media sosial, persoalannya kadang menjadi pribadi. Orang yang sebelumnya berteman bisa menjadi kurang berkomunikasi karena merasa tersinggung atau menganggap kelompoknya diserang".

I6 menjelaskan bahwa ketegangan tersebut umumnya diselesaikan melalui komunikasi informal, pertemuan antarpihak, atau bantuan teman dan senior yang diterima oleh kedua kelompok:

"Kalau masalahnya sudah terbawa ke hubungan pribadi, biasanya ada teman atau senior yang mencoba mempertemukan kedua pihak. Mereka diminta menjelaskan maksudnya dan tidak membawa perbedaan pilihan terlalu jauh. Setelah dibicarakan, hubungan biasanya dapat membaik, walaupun tidak selalu langsung kembali seperti sebelumnya".

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya proses personalisasi ketegangan, yaitu ketika perbedaan pilihan politik dan afiliasi organisasi bergeser dari perdebatan mengenai kandidat atau kepentingan kelompok menjadi ketegangan dalam hubungan antarindividu. Namun, data tidak menunjukkan bahwa proses tersebut terjadi kepada seluruh anggota HMI dan PMII ataupun muncul dalam setiap periode kontestasi. Tingkat ketegangan bergantung pada bentuk komunikasi, penggunaan bahasa, respons individu, serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola perbedaan. Pandangan berbeda disampaikan oleh informan yang pernah terlibat dalam kegiatan bersama anggota organisasi lain. Informan tersebut menjelaskan bahwa afiliasi yang berbeda tidak selalu menghambat kerja sama, terutama ketika kegiatan memiliki tujuan akademik atau kepentingan mahasiswa yang disepakati bersama:

"Kami memang berasal dari organisasi yang berbeda, tetapi dalam kegiatan fakultas tetap bisa bekerja sama. Dalam kepanitiaan, pembagian tugas dilakukan berdasarkan tanggung jawab masing-masing, bukan berdasarkan HMI atau PMII. Perbedaan pilihan ketika Pemilwa juga tidak selalu menimbulkan konflik karena setelah pemilihan kami tetap mengikuti perkuliahan dan kegiatan bersama".

Kasus pembandingan tersebut menunjukkan bahwa batas afiliasi organisasi tidak bersifat mutlak. Anggota dari organisasi yang berbeda masih dapat berkolaborasi dalam kegiatan akademik, kepanitiaan, pengabdian, dan aktivitas kelembagaan mahasiswa. Kontestasi juga dapat berlangsung tanpa berkembang menjadi konflik personal apabila perbedaan pilihan diperlakukan sebagai bagian dari proses demokrasi dan tidak disertai serangan terhadap individu maupun identitas kelompok.

Temuan mendukung interpretasi mengenai adanya fragmentasi komunikasi karena pembahasan politik dan organisasi lebih banyak berlangsung dalam jaringan internal masing-masing kelompok. Keterbatasan forum lintas organisasi dapat mengurangi kesempatan untuk mengklarifikasi informasi, memahami pandangan kelompok lain, dan mencegah prasangka antarkelompok. Meskipun demikian, temuan tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh anggota HMI dan PMII berada dalam hubungan konfliktual atau bahwa ketegangan selalu berulang pada setiap periode Pemilu. Data memperlihatkan variasi pengalaman, mulai dari sindiran dan renggangnya hubungan pertemanan hingga kerja sama lintas organisasi yang tetap berlangsung secara produktif.

Tabel 2. Matriks Temuan Dinamika Organisasi Kemahasiswaan

Tema	Bukti dalam hasil	Interpretasi temuan	Batasan temuan
Organisasi sebagai ruang belajar dan pembentukan jejaring	Informan menyampaikan pengalaman belajar komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, serta bertambahnya jaringan pertemanan. Informan lain lebih banyak merasakan manfaat sosial daripada perubahan akademik.	Organisasi menjadi salah satu ruang pembelajaran praktis dan pembentukan jejaring sosial. Manfaat yang dirasakan berbeda antarinforman.	Data tidak menunjukkan bahwa pengalaman organisasi memberikan dampak yang sama kepada seluruh mahasiswa.
Jaringan senior dan alumni	Beberapa keterangan menyebut senior atau alumni sebagai sumber informasi, relasi, dan dukungan sosial.	Hubungan dengan senior dan alumni dipersepsikan sebagai bagian dari jejaring sosial dalam organisasi.	Data yang tersedia terutama menggambarkan dukungan dalam bentuk informasi dan relasi.
Dukungan elektoral dan afiliasi organisasi	Informan menyebut adanya pembicaraan dan ajakan untuk mendukung kandidat tertentu menjelang Pemilu. Informan lain menyatakan keputusan akhir tetap berada pada masing-masing mahasiswa.	Afiliasi organisasi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi preferensi dalam Pemilu.	Bentuk dan tingkat pengaruh organisasi terhadap pilihan masing-masing anggota tidak sama dan tidak dapat ditentukan secara pasti dari data yang tersedia.
Komunikasi lintas kelompok	Informan menjelaskan bahwa diskusi lebih sering berlangsung dalam lingkungan organisasi masing-masing, sedangkan pertemuan lintas kelompok biasanya terjadi karena kegiatan atau kebutuhan tertentu.	Komunikasi lintas organisasi ada, tetapi belum berlangsung secara rutin dalam forum khusus.	Temuan tidak menunjukkan ketiadaan komunikasi antarorganisasi secara keseluruhan.
Ketegangan dalam hubungan personal	Beberapa informan menceritakan adanya sindiran atau renggangnya hubungan setelah perbedaan dukungan politik. Informan juga menyebut penyelesaian melalui komunikasi informal.	Perbedaan pilihan politik pada beberapa kasus dapat terbawa ke hubungan personal.	Pengalaman tersebut tidak dialami oleh seluruh informan dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh anggota organisasi.
Kerja sama lintas afiliasi	Informan menyebut anggota organisasi berbeda tetap bekerja sama dalam kegiatan fakultas, kepanitiaan, dan aktivitas akademik.	Perbedaan afiliasi tidak selalu menghambat kerja sama antaranggota organisasi.	Bentuk dan intensitas kerja sama dapat berbeda tergantung kegiatan dan situasi.

Diskusi

Paradoks Prosedural-Substantif sebagai Diagnosis Terbatas

Temuan menunjukkan ketegangan yang oleh informan dipahami antara keberadaan mekanisme Pemilu dan kualitas kompetisi yang mereka harapkan. Dukungan melalui afiliasi atau jejaring tidak dengan sendirinya bertentangan dengan demokrasi; jaringan merupakan bagian lazim dari mobilisasi politik. Persoalan substantif muncul apabila jaringan menutup akses informasi, membatasi kesempatan kandidat, menggantikan penilaian program dengan loyalitas, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena dokumen prosedural dan data akses kandidat belum lengkap, penelitian ini tidak menilai keabsahan Pemilu. Ia hanya mengidentifikasi area tata kelola yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Bogaards, 2018; Kennedy & Pek, 2023; Putra et al., 2024).

Pembedaan konsep membantu mencegah overclaim. Afiliasi organisasi adalah identitas dan jaringan yang dapat menjadi sumber solidaritas. Mobilisasi adalah tindakan mengorganisasi dukungan. Patronase mensyaratkan pertukaran manfaat atau akses yang perlu dibuktikan. Konflik adalah interaksi pertentangan yang dapat muncul setelah kompetisi, tetapi bukan sinonim paradoks demokrasi. “Penyalahgunaan kekuasaan” lebih ketat lagi karena memerlukan identifikasi kewenangan, tindakan, aturan atau mandat yang dilanggar, dan akibatnya. Dengan pemisahan ini, data penelitian lebih tepat dibaca sebagai persepsi mengenai keterbatasan deliberasi dan fragmentasi komunikasi, bukan bukti pelanggaran oleh organisasi atau individu tertentu (Harahap et al., 2024; Shah et al., 2021).

Etika Politik Islam sebagai Kerangka Analitis, Bukan Dampak Teruji

Pada dimensi musyawarah, temuan yang relevan adalah persepsi mengenai minimnya forum lintas kelompok dan kecenderungan komunikasi internal. Kekurangan empirisnya adalah belum tersedia inventaris forum, notulen, atau observasi sistematis. Oleh sebab itu, musyawarah tidak dapat dinyatakan “efektif meredam konflik”;

ia lebih tepat dijadikan prinsip desain untuk forum dialog yang kelak diuji. Pada dimensi keadilan, masalah yang perlu diperiksa ialah kesetaraan akses informasi, forum kandidat, dan penerapan kriteria. Data belum membuktikan diskriminasi, sehingga al-'adl dipakai sebagai standar audit prosedur, bukan vonis ketidakadilan.

Pada dimensi amanah, isu utamanya adalah transparansi aturan, akuntabilitas panitia atau pemegang jabatan, deklarasi konflik kepentingan, dan mekanisme pengaduan. Penelitian belum menemukan tindakan spesifik yang memenuhi definisi penyalahgunaan kekuasaan. Amanah karena itu diterjemahkan menjadi indikator tata kelola yang dapat diperiksa. Pada dimensi ukhuwah, keterangan tentang sindiran, ketegangan pertemanan, dan kurangnya komunikasi menunjukkan risiko relasional. Namun, data negative cases dan kerja sama lintas organisasi harus ditambahkan agar analisis tidak hanya merekam konflik. Keempat nilai ini memiliki fungsi normatif dan analitis; efektivitasnya baru dapat dinilai setelah program diterapkan dan dievaluasi (Junaidi et al., 2023; Karnaini, 2021; Pratama, 2020).

Tabel 3. Agenda tata kelola yang diusulkan untuk pilot lanjutan

Prinsip	Kesenjangan yang teridentifikasi	Komponen pilot yang diusulkan	Indikator proses/hasil yang dapat diukur
Musyawarah	Persepsi terbatasnya ruang dialog lintas kelompok	Forum netral pra- dan pasca-Pemilwa; fasilitator disepakati bersama; notulen terbuka	Keragaman peserta; tingkat kehadiran; jumlah kesepakatan; perubahan skor kualitas dialog pra-pasca
Keadilan	Kekhawatiran tentang akses informasi dan dominasi jaringan	Publikasi aturan/kriteria; akses setara ke debat dan media; audit akses kandidat	Ketepatan publikasi; proporsi kesempatan setara; skor persepsi fairness; jumlah complain terverifikasi
Amanah	Kebutuhan transparansi dan akuntabilitas	Deklarasi konflik kepentingan; log keputusan; kanal pengaduan netral; laporan tindak lanjut	Persentase deklarasi; waktu respons; jumlah pengaduan selesai; kelengkapan dokumentasi
Ukhuwah	Ketegangan yang menjadi personal dan komunikasi tertutup	Kode etik kampanye; mediasi restoratif; kegiatan lintas organisasi setelah Pemilwa	Insiden pelanggaran; penyelesaian mediasi; kolaborasi lintas kelompok; skor kepercayaan

Agar sesuai dengan orientasi penelitian terapan, tahap lanjutan sebaiknya menggunakan pendekatan partisipatif: HMI, PMII, organisasi intra, panitia Pemilwa, mahasiswa non-afiliasi, dan pihak fakultas bersama-sama memilih komponen pilot, menyepakati indikator, dan menilai risiko intervensi birokratis terhadap otonomi organisasi mahasiswa. Fakultas tidak otomatis “mengambil alih” kebijakan; perannya perlu dirumuskan berdasarkan mandat, netralitas, dan persetujuan pemangku kepentingan.

Kontribusi, Implikasi, dan Keterbatasan

Kontribusi teoretis penelitian adalah pemisahan analitis antara paradoks demokrasi, konflik, mobilisasi jaringan, patronase, politik identitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemisahan ini memungkinkan etika politik Islam dioperasionalkan sebagai empat dimensi audit tata kelola: kualitas deliberasi, kesetaraan akses, akuntabilitas kewenangan, dan pemeliharaan hubungan lintas kelompok. Kontribusi praktisnya adalah matriks diagnosis dan indikator pilot yang dapat digunakan untuk merancang evaluasi tata kelola Pemilwa, bukan klaim bahwa solusi tersebut telah berhasil.

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kasus hanya mencakup satu fakultas sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke UIN Sumatera Utara secara keseluruhan atau ke seluruh organisasi HMI dan PMII. Kedua, jumlah dan kategori informan masih harus dikonfirmasi, sementara beberapa posisi sensitif berisiko mudah dikenali. Ketiga, bukti didominasi penuturan informan; dokumen resmi, observasi tahapan Pemilwa, data kandidat, dan tanggapan institusi belum dilaporkan secara memadai. Keempat, penelitian belum menguji penjelasan alternatif dan negative cases secara sistematis. Kelima, tidak ada intervensi, baseline, pengukuran sebelum-sesudah, atau evaluasi dampak. Oleh karena itu, simpulan dibatasi pada pola persepsi dalam konteks kasus dan tidak dapat digunakan untuk menetapkan kesalahan organisasi atau individu.

Kesimpulan

Studi kasus ini menunjukkan bahwa sebagian informan memaknai dinamika Pemilwa FUSI sebagai ketegangan antara keberadaan prosedur formal dan harapan terhadap kompetisi yang lebih deliberatif, transparan, setara, serta berbasis kapasitas. Keterangan mereka mengaitkan ketegangan tersebut dengan afiliasi organisasi, konsolidasi dukungan, jaringan senior, dan keterbatasan komunikasi lintas kelompok. Bukti yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan pemaksaan, patronase, perlakuan istimewa, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakabsahan Pemilwa. Musyawarah, keadilan, amanah, dan ukhuwah memberikan kerangka untuk menilai area tata kelola dan merancang pilot lanjutan, tetapi dampaknya belum diuji. Implikasi praktis yang proporsional adalah memverifikasi aturan dan akses Pemilwa, memperluas dialog lintas kelompok, memperjelas konflik kepentingan dan kanal pengaduan, serta mengevaluasi setiap pilot dengan indikator yang disepakati. Temuan berlaku terbatas pada konteks, informan, dan bukti yang dilaporkan dalam penelitian ini.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Daftar Pustaka

- Ardianto, H. T. (2021). Aktivis dakwah di tengah percaturan politik kampus: Dinamika gerakan keislaman di Universitas Diponegoro. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 86–104. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10075>
- Bogaards, M. (2018). Deliberative democracy and electoral reform in South Africa: A campus experiment. *Politikon*, 45(2), 181–198. <https://doi.org/10.1080/02589346.2017.1354549>
- Fatahillah, A., Zuhdi, M. L., & Mukhtar, S. (2022). Pencegahan radikalisme keagamaan di pemuda Indonesia: Studi kasus organisasi mahasiswa Islam (HMI, PMII, IMM, KAMMI) periode pengurus 2017–2021. *Journal of Terrorism Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v4i2.1051>
- Griffin, M., King, D., & Reedy, P. (2022). Learning to live the paradox in a democratic organization: A deliberative approach to paradox mindsets. *Academy of Management Learning & Education*, 21(4), 624–647. <https://doi.org/10.5465/amle.2020.0238>
- Harahap, E. W., Dalimunthe, N., & Surianto, A. P. (2024). Identity politics in Islamic views. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 7(1), 1001–1010. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.934>
- Junaidi, J., Abdul Majid, L., & Nazri, M. A. (2023). Revisiting social justice: Exploring the Qur'anic paradigm in addressing contemporary challenges. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 25(2), 153–192. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>
- Karnaini, Z. (2021). Concepts and application of good governance in the government of Omar bin Abdul Aziz. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 6(1), 117–132. <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108>
- Kennedy, J., & Pek, S. (2023). Mini-publics, student participation, and universities' deliberative capacity. *Studies in Higher Education*, 48(1), 63–82. <https://doi.org/10.1080/03075079.2022.2111551>
- Mas'amah, M., Leuape, E. S., Nafie, J. A., Jelahun, F. E., & Nggaba, S. N. (2023). Political communication practice of Cipayung student organization Kupang-NTT Province. *Komunikator*, 15(1), 103–117. <https://doi.org/10.18196/jkm.16647>
- Matthews, K. E., & Dollinger, M. (2023). Student voice in higher education: The importance of distinguishing student representation and student partnership. *Higher Education*, 85(3), 555–570. <https://doi.org/10.1007/s10734-022-00851-7>
- Pratama, I. A. (2020). Pendidikan politik di perguruan tinggi: Sebuah konsepsi. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v3i1.1300>
- Putra, T. P., Widiyansyah, S., & Hardiansyah, M. A. (2024). Modal sosial pemimpin organisasi mahasiswa dalam memenangkan pemilihan raya mahasiswa di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 6(1), 55–64. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v6i1.96081>
- Rahmatiah, R., Suhendra Arbani, T., Rais Asmar, A., Umar, K., Chaerul Risal, M., & Fajri, M. (2022). The significance and integration of religious moderation in student organizations on religious campuses. *KnE Social Sciences*, 2022, 549–559. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10773>
- Shah, P. P., Peterson, R. S., Jones, S. L., & Ferguson, A. J. (2021). Things are not always what they seem: The origins and evolution of intragroup conflict. *Administrative Science Quarterly*, 66(2), 426–474. <https://doi.org/10.1177/0001839220965186>
- Suhada, K., Sabrina, Zalika, A., Fitriani, R., Nuriski, N. A., Naufal, M. F., Taqwa, R., Sari, K. A., & Ilham, I. (2026). Narasi superioritas dalam kontestasi mahasiswa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 495–505. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5125>
- Wulandari, A. P. A., & Harahap, A. M. (2025). The role of female activists in enhancing inter-member organizational performance: A case study of the PMII organization at UIN Sumatera Utara. *Journal La Sociale*, 6(5), 1377–1392. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i5.2302>